

# Tantangan Pengaturan Pendanaan Politik

---

J. Danang Widoyoko, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia

---

---

# Mengapa sulit mengatur pendanaan politik?

---



- Kontrol dan akses atas sumber daya finansial memberikan keuntungan bagi parpol dan kandidat dalam politik elektoral.
- Partai dan kegiatan politik semakin profesional: menggunakan media dan staf profesional, bukan kader → ongkos politik semakin mahal.
- Partai politik dikuasai oleh donatur utama (pendiri, elit parpol).
- Kemenangan atas politik elektoral memberi akses pada alokasi sumber daya publik serta rente.
- Kelembagaan pendanaan politik memberi keuntungan pada partai dan kekuatan politik utama.

# Berbagai inisiatif



- Monitoring oleh masyarakat
- Regulasi pendanaan politik dalam Pemilu legislatif dan eksekutif: pembatasan sumbangan, transparansi donatur.
- Bantuan negara meskipun jumlahnya kecil.
- SIPP KPK-BRIN

- SIARAN PERS
- BAWASLU MEMANGGIL
- BAWASLU MENDENGAR
- PUBLIKASI
- SIGARU
- PUSAT PARTISIPASI PENGAWASAN PEMILU
- GALERI FOTO
- GALERI VIDEO

#### Tautan

-  Republik Indonesia
-  Dewan Perwakilan Rakyat
-  Komisi Pemilihan Umum
-  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
-  Mahkamah Konstitusi

- [Galeri Foto](#)
- [Galeri Video](#)
- [Berita](#)
- [Press Release](#)
- [Buletin](#)
- [Agenda](#)
- [Buku Bawaslu](#)
- [Pakta Integritas](#)
- [Daerah](#)

#### ICW Serahkan Laporan Dana Kampanye Tentang Belanja Iklan dan Spot Iklan



### Political Party Finance Reform in Southeast-Asia

- RESPECT (The Asia Pacific Regional Support for Elections and Transition) Program in collaboration with:
  - Pehludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/The Association for Elections and Democracy) - Indonesia
  - Bersih 2.0 - Malaysia
  - LENITE (Legal Network for Truthful Elections) - Philippines
  - PRADET (Psychosocial Recovery and Development in East Timor) and Cauca Women in Politic Foundation - Timor Leste
  - International IDEA (The International Institute for Democracy and Electoral Assistance)



---

# Laporan keuangan partai politik

---

- Publikasi laporan keuangan terbatas pada laporan audit BPK atas penggunaan keuangan negara.
- Parpol tidak membuat laporan keuangan terkonsolidasi.
  1. Dari seluruh sumber penerimaan (bantuan negara, iuran anggota, donasi pendukung).
  2. Laporan keuangan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
  3. Laporan keuangan parpol, dana kampanye legislatif, dana kampanye Pilpres dan Pilkada
- Problem regulasi: tidak ada sanksi dan petunjuk teknis; tidak ada regulator dana kampanye

---

# Sistem Integritas Partai Politik

---



- Mendorong agar partai politik bekerja semakin baik dengan memberikan insentif tambahan bantuan keuangan negara.
- Indikator SIPP
  1. Kode etik
  2. Keuangan parpol
  3. Demokrasi internal
  4. Rekrutmen
  5. Kaderisasi
- SIPP menjadi salah satu agenda dalam Stranas PK.
- Problem: resistensi parpol dan dukungan anggaran
- Implikasi terhadap partai politik:
  - privat atau publik?
  - Partai elit (dan variasinya: presidensial, oligarki), kader atau catch-all?

---

# Rekomendasi

---



- Mendorong dukungan dari pemerintah dan partai politik untuk menerapkan SIPP.
- Menempatkan negara sebagai pemegang saham utama partai politik.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik, persyaratan mengikuti Pemilu bukan rekening dana kampanye, tetapi juga laporan keuangan terkonsolidasi.
- Dukungan untuk peningkatan keterampilan teknis dalam pengelolaan dan pelaporan dana politik.
- Membenahi berbagai persoalan di luar area politik: pengadaan barang dan jasa serta distribusi sumber daya publik; reformasi penegakan hukum



Terima Kasih